



Accepted: November 2023	Revised: January 2023	Published: February 2024
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Sawalunto

Elizasri¹, Joni Putra², Fadriati³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

e-mail: lizamarlizto@gmail.com¹; joniputrauje@gmail.com²; sumartomanajemen@gmail.com³

Abstract

Accreditation of the study program is necessary to make sure it never expires. Because it will affect the outcomes of the study program's continued existence as decided by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT). Accreditation preparation is a difficult process that demands collaboration and support from all stakeholders to get a respectable accreditation result. The issue is that many parties—especially the school—do not sincerely support the accrediting process. As a result, effective communication is necessary for everyone to show their seriousness and unity. To raise the value of accreditation, this essay explores how infrastructure management may enhance accreditation. This study employs a qualitative descriptive analytical methodology. Min 2 Sawalunto City is the research location. Based on the study's findings, it can be concluded that, from planning to implementation to evaluation, the majority of Sawalunto City's Min 2 teachers believe that the facilities and infrastructure management with accreditation achievement in the area is high. As an educator, manager, supervisor, administrator, leader, and motivator, the school principal has demonstrated good facility and infrastructure management. This has allowed him to create a high-achieving educational institution that meets standards for infrastructure.

Keywords: *Infrastructure Management; Accreditation; BAN-PT.*

Abstrak

Program studi harus diakreditasi untuk memastikan bahwa itu tidak akan berakhir. karena akan mempengaruhi keberadaan program studi yang diakui oleh BAN PT. Untuk mendapatkan akreditasi yang menguntungkan, persiapan akreditasi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Namun, ada masalah dengan sejumlah orang yang tidak benar-benar mendukung proses akreditasi, terutama sekolah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan solidaritas dan keseriusan dari semua pihak, komunikasi yang tepat diperlukan. Dalam artikel ini, kita akan menemukan berbagai cara manajemen infrastruktur dapat meningkatkan akreditasi untuk meningkatkan nilai akreditasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Kota Min 2 Sawalunto. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar guru di Min 2 Sawalunto berpendapat tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagai pendidik, manajer, motivator, pengawas, administrator, pemimpin, dan motivator, kepala sekolah telah menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif.

Kata Kunci: Manajemen Infrastruktur; Akreditasi; BAN-PT.

Pendahuluan

Pendidikan harus terus berlanjut seiring perkembangan manusia. Pendidikan yang baik dan berkualitas pasti akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan potensi sumber daya lainnya di negara tersebut. Dr. Kartini Kartono mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk pembangunan masa depan (Aprijon, 2014). Ini berarti bahwa pendidikan diharapkan dapat mendorong setiap orang untuk meningkatkan kualitas keberadaannya dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu, pendidikan adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk mendorong, membina, membantu, dan membimbing seseorang untuk mengembangkan potensinya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pendidikan adalah upaya untuk mendewasakan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri, dalam arti yang menuntut agar anak-anak memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab atas semua tindakan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari (Basri, 2017).

Pendidikan dirancang berdasarkan perkembangan dan potensi siswa dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sangat penting untuk masa depan bangsa karena anak-anak adalah penerus bangsa, merekalah yang akan membangun bangsa untuk berkembang dan maju sehingga tidak tertinggal dari negara lain. Anak yang menerima pendidikan yang komprehensif akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut BAB VII Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap lembaga pendidikan harus memiliki sarana yang lengkap. Sarana yang ini termasuk perabot, peralatan, media, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana ini harus mencakup lahan, kelas, pendidik, pimpinan satuan pendidikan, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin, ruang olahraga, dan tempat bermain (Aprijon, 2014).

Pemerintah dan sektor swasta telah berkomitmen untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pembangunan pendidikan yang lebih

berkualitas. Mereka menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dan betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Sarana dan prasarana sangat mendukung dan memperlancar proses pendidikan. Sarana dan prasarana adalah bagian integral dari proses pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan tidak boleh diabaikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebaliknya, mereka harus dipikirkan dengan cara yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya di lembaga pendidikan. Apalagi di era teknologi saat ini, di mana pendidikan harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam suatu organisasi, lembaga, atau lembaga pendidikan, prasarana dan sarana sangat penting.

Tanpa dukungan, proses pendidikan tidak akan berhasil. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efektif. Misalnya, gedung, ruang kelas, kursi, meja, dan perangkat pendidikan. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung membantu proses pendidikan. Seperti kebun, taman, jalan, dan halaman, semuanya berfungsi sebagai sarana pendidikan jika digunakan secara langsung untuk mengajar. Misalnya, taman digunakan untuk mengajar biologi atau halaman digunakan untuk olahraga (Mustar, 2014).

Sangat penting bagi sebuah sekolah untuk mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sebuah sekolah dengan sarana dan prasarana yang baik juga akan memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik untuk mendukung proses belajar. Selain itu, diharapkan tersedianya sumber daya pendidikan yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, fasilitas tersebut harus dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mendukung proses pendidikan dan pengajaran, baik untuk guru sebagai pendidik maupun untuk siswa sebagai pelajar. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti selama proses pendidikan (Mulyasa, 2003, p. 50). Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru.

Permendiknas No. 24 Tahun 2007, Pasal 1 menetapkan bahwa standar sarana dan prasarana sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MT), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) harus memenuhi standar minimum sarana dan prasarana. Penilaian akreditasi sekolah harus memenuhi standar minimum ini.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dikenal sebagai akreditasi. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah diwajibkan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat melahirkan lulusan yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing dan mampu menghadapi tantangan zaman. Akreditasi adalah upaya untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan memenuhi standar. Dengan demikian, penyelegaraan pendidikan menghasilkan hasil pendidikan yang buruk, yang merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya.

Dalam peringkat ini, yang dimaksudkan adalah posisi suatu sekolah dibandingkan dengan sekolah lain dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah-sekolah dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan memberikan predikat A, B, atau C.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Akreditasi Sekolah tahun 2003 adalah suatu proses penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah. Menurut Suharsimi (2001:256), akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan kelayakan.

Berdasarkan pemahaman ini, akreditasi sekolah dapat didefinisikan sebagai proses menilai kualitas setiap sekolah dengan membandingkan keadaan sekolah dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika keadaan sekolah lebih besar atau sama dengan standar, maka sekolah tersebut dinyatakan terakreditasi. Jika keadaan sekolah lebih kecil, maka sekolah tersebut tidak terakreditasi.

Akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan standar mutu yang ditetapkan dan terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah, akreditasi sekolah dapat didefinisikan sebagai proses penilaian kualitas sekolah, baik negeri maupun swasta, dengan menggunakan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Selanjutnya, hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.

Pembicaraan tentang sumber daya pendidikan di Indonesia selalu dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ayat 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik (Kompri, 2014). Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk mengatur dan memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan berarti selama proses pendidikan.

Perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan dan penataan adalah semua bagian dari pekerjaan pengelolaan ini. Meskipun MIN 2 Kota Sawalunto adalah sekolah dengan akreditasi "B", beberapa fasilitas dan prasarana masih kurang, terutama dalam hal peralatan dan kebutuhan air. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen fasilitas sekolah untuk meningkatkan akreditasi sekolah.

Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah jenis studi kasus (Sugiyono, 2013), menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Sukmadinata, 2013), dan teknik pengumpulan datanya adalah observasi (Arikunto, 2016). Peneliti menggunakan observasi langsung, wawancara (peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur (Mulyana, 2008), dokumentasi, dan menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti laporan tertulis, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, rekaman kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian. Teknik dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan, memperkuat, dan menguji setiap hasil wawancara dan observasi.

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi, atau lampiran dari observasi, juga uraian dalam bentuk bahasa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Analisa data dalam penulisan ini dilakukan secara bertahap, setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengkategorian data secara

rinci, sehingga data yang telah ada bisa dipilih-pilihkan. Analisa data ini dilakukan pada saat dan setelah dilapangan, analisis dan pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang

Temuan dan Pembahasan.

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Siapa pun yang memfasilitasi atau membiayai pengadaan fasilitas pendidikan sekolah juga harus dipertimbangkan saat menentukan sarana pendidikan sekolah. Pihak sekolah dapat meminta pengadaan sumber daya pendidikan kepada lembaga tingkat atas, seperti pemerintah melalui Kementerian Agama provinsi, kabupaten, atau kota. Mereka juga dapat meminta komite sekolah untuk mengajukan RAPBM (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah) pada awal tahun akademik, atau mereka dapat meminta sumbangan dari masyarakat. Jika pengajuan pengadaan sarana pendidikan tersebut hanya sebagian yang disetujui, maka perlu menentukan skala prioritas atau sarana yang paling penting dan mendesak yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan identifikasi, daftar pengadaan sarana harus diurutkan mulai dari nomor terkecil untuk sarana atau fasilitas yang paling penting atau mendesak, dan kemudian diikuti oleh sarana lain sesuai dengan urutan yang sesuai.

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan pada hakikatnya mempengaruhi akreditasi sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja personel sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kinerja para pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah, sangat berpengaruh pada seberapa baik akreditasi sekolah berjalan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah didasarkan pada beberapa tujuan, menurut Harun (2009:86): "(a) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana karena berkembangnya kebutuhan sekolah, (b) perencanaan untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang, dan (c) perencanaan sarana dan prasarana untuk persediaan barang".

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Menurut hasil penelitian, pengadaan sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang sudah ditetapkan. Sebelum pengadaan dilakukan, sekolah membuat proposal. Jenis barang yang diminta, jumlah satuannya, merek dan tipenya, dan taksiran harganya harus dicantumkan secara jelas dalam proposal pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana untuk sekolah melalui pembelian langsung dari toko-toko sarana dan prasarana yang tersedia secara luas.

Pengadaan adalah proses yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan sekolah. Menurut Soetjipto (2010:171), "pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah". Dalam konteks sekolah, pengadaan mencakup semua kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua kebutuhan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Untuk menjaga kualitas fasilitas yang ada, diperlukan perbaikan. Perbaikan adalah proses pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memperbaiki atau mengganti instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak atau dengan memperbaiki satu unit sarana dan prasarana secara keseluruhan. Pada akhirnya, satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut akan dapat digunakan.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Beberapa karyawan ditunjuk oleh kepala MIN 2 Kota Sawalunto untuk memelihara sarana dan prasarana sekolah secara insidental dan rutin. Jika ada kerusakan pada sarana dan prasarana, hal itu akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan diputuskan apakah perlu diperbaiki atau diganti dengan sarana dan prasarana tersebut oleh atasan berwenang. Pemerintah, donatur, dan komite sekolah memberikan dana untuk pemeliharaan.

Kepala sekolah setiap jenjang pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan lancar, kepala sekolah yang memiliki wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang bertanggung jawab atas penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tugas untuk menyusun jadwal untuk melakukannya. "Penggunaan barang habis pakai harus secara maksimal dan dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan sekali, sedangkan barang tetap dipertanggungjawabkan satu tahun sekali", kata Suryosubroto (2010:116). Terdapat beberapa jenis pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, baik dari segi sifat maupun waktunya. Ini termasuk pemeliharaan sehari-hari, yaitu membersihkan ruang dan perlengkapannya, dan pemeliharaan berkala, yaitu pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat.

Penghapusan Sarana dan Prasarana

Penghapusan sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti: sarana sudah tua atau rusak berat, membutuhkan biaya yang besar untuk diperbaiki, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, dan dicuri, terbakar, atau musnah oleh bencana alam. Dalam kebanyakan kasus, penghapusan dilakukan dengan dua cara: dimusnahkan atau dilelang kepada guru dan karyawan sekolah.

Menurut Harun (2009:88), "Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik negara/daerah dari daftar inventaris." Dengan kata lain, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran.

Penghapusan inventaris tidak boleh mengganggu tugas sehari-hari dan harus mempertimbangkan penggantinya, Kepala sekolah dan karyawannya harus mengelompokkan dan mencatat semua barang yang akan dihapus. Kemudian, mereka mengajukan usulan penghapusan beserta lampiran jenis barang yang akan dihapus ke Kementerian Agama setelah SK dari kantor pusat tentang penghapusan barang sesuai berita acara yang ada. Barang-barang ini dapat dihapus melalui pemusnahan atau pelelangan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar, mengurangi biaya, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pengamanan, dan mengurangi beban inventarisasi.

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana MIN 2 Kota Sawalunto cukup untuk meningkatkan hasil akreditasi, sebagian besar guru di MIN 2 Kota Sawalunto berpendapat bahwa Manajemen Sarana dan Prasarana dengan Pencapaian Akreditasi sangat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kepala sekolah telah melakukan manajemen sarana dan prasarana dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, mereka memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pendidik, manajer, motivator, supervisor, administrator, leader, dan

motivator. Mereka melakukan ini untuk memastikan bahwa institusi pendidikan berkualitas tinggi dan berprestasi serta memenuhi standar sarana dan prasarana.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah dan staf sarana dan prasarana menganalisis kebutuhan dan fungsi, melakukan perencanaan sebelum tahun ajaran baru, dan membuat proposal pengembangan. Perencanaan sesuai prosedur adalah faktor pendukung manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan akreditasi.

Selain itu, adanya dukungan dari semua anggota staf sekolah. Terlihat bahwa tidak hanya kepala sekolah dan karyawan tata usaha yang mengelola sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto, tetapi juga seluruh siswa dan guru berpartisipasi dalam mengelola sarana dan prasarana dengan cara yang awet dan tahan lama. Dengan cara ini, kita dapat menghemat biaya pengadaan dan pemeliharaan dalam kasus barang rusak.

Pemahaman tentang sarana dan prasarana akan membantu pengambil kebijakan di sekolah memahami bagaimana sarana dan prasarana dapat digunakan untuk mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar, agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Menurut Harun (2009:85), manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar, agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa fenomena latar belakang pencapaian akreditasi berhubungan dengan sarana dan prasarana, meskipun banyak faktor pendukung akreditasi menjadi lebih baik. Selain itu, hasil lapangan menunjukkan bahwa penilaian guru tentang Manajemen Sarana dan Prasarana memenuhi standar yang cukup. Ini menunjukkan bahwa Manajemen Sarana dan Prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto masih membutuhkan peningkatan.

Ketika manajemen sarana dan prasarana pendidikan bekerja dengan baik, mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Sekolah yang baik harus bersih, rapi, dan indah, yang menciptakan kondisi yang ideal untuk siswa.

Akreditasi sekolah harus menilai dan mengevaluasi standar berikut: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Akreditasi madrasah dapat didefinisikan sebagai proses penilaian kualitas madrasah, baik negeri maupun swasta, dengan menggunakan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di institusi tersebut (Departemen Agama RI, 2005, 5-6). Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa fenomena latar belakang pencapaian akreditasi berhubungan dengan sarana dan prasarana, meskipun banyak faktor pendukung akreditasi menjadi lebih baik. Selain itu, hasil lapangan menunjukkan bahwa penilaian guru tentang Manajemen Sarana dan Prasarana memenuhi standar yang cukup. Ini menunjukkan bahwa Manajemen Sarana dan Prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto masih membutuhkan peningkatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah komponen yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan dan meningkatkan akreditasi MIN 2 Kota Sawalunto. Peneliti menemukan sebelas indikator yang digunakan untuk menganalisis Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Akreditasi di MA Darul Ihsan. Mereka adalah

sebagai berikut: (1) analisis fungsi dan kebutuhan sarana dan prasarana, (2) perencanaan anggaran, (3) membuat proposal, (4) kuitansi pengadaan dan surat hibah, (5) pencatatan barang di kelas, di ruang guru dan Kepala Sekolah, (6) pencatatan barang di perpustakaan, UKS, dan toilet, (7) pencatatan barang di UKS dan toilet, dan (8) jadwal kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, (9) anggaran pemeliharaan, (10) pemilahan barang, dan (11) penghapusan

Faktor-faktor berikut mendukung peningkatan akreditasi manajemen sarana dan prasarana: (1) Perencanaan sesuai prosedur, yang dapat dilihat dari pengalaman penulis dengan kepala sekolah dan staf sarana dan prasarana yang menilai kebutuhan dan fungsi, melakukan perencanaan sebelum tahun ajaran baru, dan membuat proposal pengadaan; dan (2) Aturan dan kedisiplinan dalam kearsipan. Selanjutnya, catat semua barang di kelas. (3) Dukungan dari semua anggota staf sekolah. Terlihat bahwa tidak hanya kepala sekolah dan staf tata usaha yang mengelola sarana dan prasarana di MIN 2 Kota Sawalunto, tetapi semua siswa dan guru berpartisipasi dalam mengelola sarana dan prasarana dengan cara yang awet dan tahan lama. Dengan cara ini, kita dapat menghemat biaya pengadaan dan pemeliharaan dalam kasus barang rusak.

Penutup

Penelitian tentang "Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Akreditasi MIN 2 Kota Sawalunto" di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto menunjukkan bahwa: 1) Manajemen sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan akreditasi. 2) Perencanaan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto telah dilakukan dengan baik dan mampu meningkatkan akreditasi. Selain itu, secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk pelaporan persyaratan, pengolahan data, dan penetapan kebutuhan dana analisis kebutuhan. Dalam hal pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto, prioritas pengadaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga waktu pelaksanaan dapat dianggap kondisional. Dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Sawalunto melakukan pemeliharaan rutin.

Daftar Pustaka

- Aprijon. (2014). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru SLTP. *Menara Riau: Jurnal*.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.(2009). *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Agama RI. (2005). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- E.Mulyasa. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamiyah, Nur,dan Mohammad jauhar. (2015). *Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Prestasi pustaka.
- Harun, Cut Zahri. (2009). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Yogyakarta: Pena Persada Desktop Publisher

- Kompri. (2014). *Manajemen Pendidikan 2*. Bandung: Alfabeta. Matin dkk. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Matin et al. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jannah, M. (2010). *Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs*.
- Mulyasa, E. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustar, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syukur, F. (2011). *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suryosubroto. (2010). *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. (2009). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Husaini. (2009). *Manajemen (Teori, Praktik dan Riset Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.